

## IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PADA ANAK TERLANTAR DI KOTA BANDUNG

Shinta Nur Sucianti<sup>1\*</sup>, Muhamad Nur Afandi<sup>2</sup>, Indra Kristian<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Alumni Politeknik STIA LAN Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
*shintasucianti11@gmail.com*

<sup>2</sup>Dosen Politeknik STIA LAN Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
*m.nurafandi@poltek.stialanbandung.ac.id*

<sup>3</sup>Dosen Universitas Al Ghifari, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
*technician2007@gmail.com*

### ABSTRAK

Fenomena anak terlantar di Kota Bandung memiliki perhatian khusus oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi Program Rehabilitasi Sosial pada Anak Terlantar di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi sosial anak terlantar di Kota Bandung, dan merekomendasikan upaya yang dilakukan pada implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kota Bandung. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan lokus penelitian pada Dinas Sosial Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Informan dari penelitian adalah pekerja sosial dan penyuluh sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung serta pengelola yayasan atau pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi sosial pada anak terlantar yaitu yayasan miftahul fallah dan yayasan kumala. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kota Bandung secara umum telah berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa kekurangan dan terdapat kendala pada aspek kecenderungan pelaksana dan aspek kondisi ekonomi, sosial dan politik. Saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti adalah membentuk tim khusus penanganan anak terlantar agar berfokus pada rehabilitasi anak.

**Kata Kunci:** Implementasi Program, Rehabilitasi Sosial dan Anak Terlantar.

### ABSTRACT

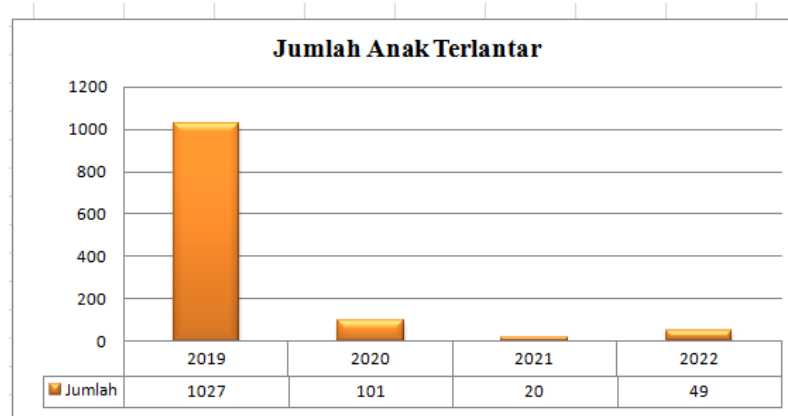
*The phenomenon of abandoned children in the city of Bandung has special attention from the Bandung City Social Service. This research was conducted to understand the implementation of the Social Rehabilitation Program for Neglected Children in Bandung City. The aim of the research is to analyze the implementation of the social rehabilitation program for abandoned children in Bandung City, and recommend the efforts made to implement the Social Rehabilitation Program for Neglected Children in Bandung City. This research approach uses a qualitative descriptive approach, with the research locus at the Bandung City Social Service. This research uses data collection techniques using interviews, observation and document study methods. The informants for the research were social workers and social counselors at the Bandung City Social Service as well as foundation managers or parties involved in the social rehabilitation process for neglected children, namely the Miftahul Fallah Foundation and the Kumala Foundation. The results of the research conclude that the implementation of the Social Rehabilitation Program for Neglected Children in the City of Bandung has generally gone well, but there are still several shortcomings and there are obstacles in terms of the tendencies of implementers and aspects of economic, social and political conditions. The suggestion that researchers can recommend is to form a special team to handle abandoned children to focus on child rehabilitation.*

**Keywords:** Program Implementation, Social Rehabilitation and Neglected Children.

## PENDAHULUAN

Kota Bandung merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia. Kota Bandung menjadi satu diantara banyak kota di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang tidak menutup kemungkinan Kota Bandung sering menghadapi masalah sosial. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menangani permasalahan sosial. Masalah sosial dapat diartikan ketidaksesuaian antara komponen-komponen kebudayaan maupun masyarakat, yang dapat membahayakan suatu kehidupan kelompok sosial (Soejorno, 2002). Untuk menyelesaikan masalah sosial diperlukan intervensi berupa inovasi sosial, dimana inovasi sosial merupakan bagian penting dari kebijakan pembangunan (Afandi dkk:2023). Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai upaya perlindungan terhadap anak dengan memberi kewenangan kepada Dinas Sosial Kota Bandung sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial,. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan publik (Harun dkk:2019) dan diperlukan sebuah komitmen dalam penanganan anak terlantar (Mutiara:2020).

Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang sosial juga memberikan pelayanan untuk masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk penanganan masalah sosial yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagaimana yang terdapat pada rencana strategi (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2023 bahwa terdapat 26 jenis PPKS yang diurus oleh Dinas Sosial Kota Bandung diantaranya yaitu Anak Balita Yang Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Terlantar, Anak di Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitas, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Anak Korban Tindak Kekerasan, Lanjut Usia yang Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tunasusila, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan, Orang Dengan Hiv/Aids, Korban Penyalahgunaan Napza, Korban Tindakan Kekerasan, Korban Trafficking, Pegawai Migran Yang Bermasalah, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis dan Komunitas Adat Terpencil. PPKS di Kota Bandung diberi bantuan dan dibina dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dengan didukung dengan alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kota Bandung. Jumlah PPKS di Kota Bandung dengan melihat data PPKS pada tahun 2018 berjumlah 80.388 jiwa (Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2023). Masalah sosial yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bandung yaitu masalah anak terlantar.



Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2022.

**Gambar.1.** Jumlah Anak Terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Bandung



Fenomena anak terlantar di Kota Bandung masih tergolong kasus dengan jumlah angka yang tinggi, maka dari itu Dinas Sosial Kota Bandung memiliki program urusan wajib dinas sosial yaitu Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Yang Terlantar yang memiliki aktivitas Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti sebagai upaya memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran karena anak merupakan penerus cita-cita kehidupan bangsa. Pada proses rehabilitasi anak terlantar, Dinas Sosial Kota Bandung berpedoman pada standar rehabilitasi sosial dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu tahapan awal, asesmen, intervensi dan terminasi.

Secara konseptual, Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Yang Terlantar ini sebetulnya sudah cukup baik dan jelas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan dibentuknya tim khusus guna untuk merespon segala permasalahan sosial di Kota Bandung yaitu Unit Sosial Respon (USR) mencirikan bahwa organisasi masyarakat turut dalam proses rehabilitasi sosial anak. Namun sebagaimana hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan, kegiatan rehabilitasi anak terlantar masih belum optimal karena kegiatan yang dilaksanakan masih tergabung menjadi satu antara rehabilitasi anak terlantar dengan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta fasilitas penunjang penyelenggaraan rehabilitasi anak belum memadai. Kajian anak terlantar belum dilakukan di Kota Bandung, karena kajian yang ditemukan pada wilayah Kota sungai penuh, kota malang dan kota palu (Fitri dkk:2020, Aman dkk:2017: Agustina dkk:2019, Ariska dkk:2021)

Berdasarkan permasalahan tersebut dan penelitian terdahulu, sejauh ini belum banyak peneliti yang mengelaborasi program rehabilitasi sosial anak terlantar menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn dengan 6 (enam) variabel (Agustino:2006) yaitu: (1). Standar dan Tujuan Kebijakan, (2). Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana, (3). Sumber-Sumber Kebijakan, (4). Karakteristik Badan Pelaksana, (5). Kecenderungan Pelaksana, (6). Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik. Peranan kebijakan memberikan peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Afandi:2014). Dengan demikian implementasi rehabilitasi penanganan anak terlantar di Kota Bandung menjadi penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berarti data utamanya ialah kata-kata dan tindakan yang dilakukan di lapangan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen yang terkait (Sugiyono:2018). Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif, (Miles & Huberman :2005) terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan, yaitu: (a) pengumpulan data; (b) reduksi data; (c) penyajian (display) data; dan (d) penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui proses wawancara serta observasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen baik dalam bentuk laporan dan catatan yang terkait. Wawancara dilakukan dengan informan yaitu pekerja sosial, penyuluh sosial, penyuluh rumah singgah dan yayasan kumala serta yayasan miftahul fallah.

## **PEMBAHASAN**

Fenomena anak terlantar di Kota Bandung menjadi permasalahan yang kompleks yang perlu perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat Kota Bandung. Keberadaan anak terlantar di Kota Bandung menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya yaitu mengganggu ketertiban



masyarakat ditandai dengan adanya keluhan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung serta adanya dokumentasi yang menunjukkan keberadaan anak terlantar di Kota Bandung perlu ditangani. Maka dari itu, Dinas Sosial Kota Bandung memiliki program rehabilitasi anak terlantar untuk memulihkan kembali fungsi sosial pada anak. Dalam penelitian ini untuk menganalisis Program Rehabilitasi Sosial Pada Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bandung peneliti menggunakan konsep teori van meter van horn dengan membahas 6 (enam) unsur, diuraikan sebagai berikut :

### **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Program rehabilitasi sosial pada anak terlantar mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Standar kebijakan yang digunakan pada tahapan rehabilitasi sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial yang memiliki 4 (empat) tahapan, yaitu:

#### **1. Tahapan Awal**

Pada tahapan awal, Dinas Sosial Kota Bandung melakukan penjangkauan dan penjaringan yang dibantu oleh tim unit sosial respon (USR), pekerja sosial dan TNI AD untuk menjaring para PPKS termasuk anak terlantar di jalanan yang sudah diketahui titik lokasi penjemputan. Anak yang telah dijaring oleh tim USR dibawa ke Dinas Sosial Kota Bandung dan diserahkan kepada pekerja sosial untuk dimintai keterangan dan mendapatkan rehabilitasi dari para penyuluh sosial yang berada di UPTD Rumah Singgah yang berada di Dinas Sosial Kota Bandung. Pekerja sosial melakukan pendataan dengan menggunakan prinsip intake (kontak dan kontrak) yaitu menghargai keberadaan klien sebagaimana kondisi dan situasi saat diterima. Pendataan dilakukan kepada anak yang dapat berkomunikasi dengan menanyakan nama, asal kota serta pengecekan kesehatan klien. Setelah dilakukan intake, selanjutnya penandatanganan kontrak sosial yang menyatakan bahwa klien bersedia tinggal dan mendapatkan pelayanan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Tahapan selanjutnya yaitu kegiatan asesmen yang dilaksanakan oleh pekerja sosial

#### **2. Asesmen**

Pada tahap ini pekerja sosial membuat rancangan untuk melakukan asesmen dengan cara penggalan informasi kepada anak secara mendalam. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, tracing untuk mengidentifikasi karakteristik masalah dan sebab sehingga dapat mengukur kapasitas pengentasan masalah. Proses asesmen dilakukan dengan cara pendekatan kepada anak dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan membuat anak merasakan kenyamanan sehingga terciptanya rasa kepercayaan pada anak untuk bercerita kepada penyuluh sosial. Hal ini sebagaimana hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bersama penyuluh sosial yang melakukan asesmen. Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi maka penyuluh sosial dapat merencanakan penentuan program pelayanan sesuai hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi anak. Setelah perencanaan yang telah dirancang dan disetujui oleh kepala bidang rehabilitasi sosial dan kepala seksi rehabilitasi anak dan lanjut usia, maka proses selanjutnya yaitu intervensi.

#### **3. Intervensi**

Pelaksanaan pelayanan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:



Pelayanan Intervensi Fisiologis yaitu pelayanan pangan, pelayanan papan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan Intervensi Rehabilitasi Sosial yaitu pelayanan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan pada tahap assessment. Terdapat 4 (empat) kegiatan di Dinas Sosial Kota Bandung yaitu:

a. Bimbingan Spiritual

Dinas Sosial Kota Bandung bekerja sama dengan Yayasan Miftahul Fallah, materi yang disampaikan kepada anak dan PPKS jenis lainnya yaitu tata cara sholat, pekerjaan dalam Islam, serta materi keagamaan lainnya.

b. Bimbingan Fisik

Dinas Sosial Kota Bandung bekerja sama dengan Sanggar Hif Hof Studio. Bimbingan fisik dilaksanakan setiap hari Jum'at pada pagi hari, seluruh pihak terlibat dan ikut berpartisipasi. Kegiatan ini bertujuan menjaga kesehatan pada anak dan PPKS lainnya.

c. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial dilakukan oleh penyuluh sosial, pemberian materi kepada anak sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilaksanakan, namun kegiatan bimbingan anak dan PPKS lainnya masih menyatu.

d. Keterampilan

Dinas Sosial Kota Bandung bekerja sama dengan Yayasan Kumala. kegiatan yang dilaksanakan ini yaitu membuat kertas dari bubur kertas. Kegiatan membuat kertas ini bertujuan meningkatkan kreativitas pada anak, anak berpartisipasi dan turut memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh PPKS lainnya juga. Setelah kegiatan intervensi dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pekerja sosial mengidentifikasi kembali keadaan anak yang perlu dilakukan bimbingan lanjutan di dalam panti atau dilakukan terminasi yaitu penghentian pelayanan

4. Terminasi

Bentuk terminasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, yaitu sebagai berikut:

a. Reunifikasi, pengembalian klien anak kepada pihak keluarga dengan didasari adanya asesmen sosial. Pengembalian klien anak dilakukan dengan cara mengantarkannya ke daerah asal maupun dilakukan penjemputan oleh keluarga ke Dinas Sosial Kota Bandung. Selain itu dilakukannya pemberian penyuluhan kepada keluarga klien berdasarkan dengan hasil asesmen dengan harapan hal penelantaran anak tidak terjadi lagi.

b. Panti Sosial, anak yang diterminasi ke panti sosial merupakan anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya dan memerlukan rehabilitasi lanjutan. Pada permasalahan anak, Dinas Sosial Kota Bandung bekerja sama dengan beberapa yayasan maupun panti asuhan yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Tujuan Kebijakan rehabilitasi sosial pada anak terlantar yaitu sebagai berikut (1). Melindungi dan memenuhi hak anak, (2). Memulihkan kembali pola pikir anak tentang masa depan, (3). Mencegah adanya hambatan dan gangguan fungsi sosial anak, (4). Memberikan penyuluhan dan pemahaman bagi keluarga klien.



5. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Penyampaian informasi terkait kebijakan rehabilitasi sosial anak terlantar di Dinas Sosial Kota Bandung dilakukan kepada karang taruna wilayah Kota Bandung, tim unit sosial respon (USR), kepolisian, TNI dan dinas terkait. Komunikasi antara karang taruna wilayah Kota Bandung, tim unit sosial respon (USR), kepolisian, TNI dan dinas terkait dilakukan baik secara verbal maupun rapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan.

6. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber dari kebijakan rehabilitasi sosial anak:

Dana, dana bagi kegiatan rehabilitasi sosial anak berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya yang tidak mengikat seperti Corporate Social Responsibility (CSR). Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksana kebijakan rehabilitasi anak di Dinas Sosial Kota Bandung terdiri dari kepala dinas, kepala bidang rehabilitasi sosial, kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pekerja sosial, penyuluh sosial, pengurus UPTD rumah singgah, fungsional dan pihak eksternal yang memiliki keahlian di bidang sosial. Sarana dan Prasarana, kebutuhan akan sarana dan prasarana dari kegiatan rehabilitasi anak tidak begitu banyak yaitu kamar tidur, aula dan ruangan anak. Namun, kebutuhan ini dianggap penting guna menjalankan kegiatan dengan maksimal.

7. Karakteristik Badan Pelaksana

Pekerja sosial maupun penyuluh sosial merupakan komponen penting dalam pelaksanaan rehabilitasi anak, maka dari itu para pekerja sosial dan penyuluh sosial di Dinas Sosial Kota Bandung memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1) di bidang sosial, memiliki pengalaman organisasi sosial, dan bergabung dengan organisasi sosial eksternal. Hal ini berpengaruh dengan kegiatan rehabilitasi karena mereka memiliki pengalaman di bidang sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung melakukan pengawasan dengan menerima laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan.

8. Kecenderungan Pelaksana

Para pelaksana sudah mengetahui tujuan dari kebijakan rehabilitasi anak dengan baik, tanggapan yang diberikan juga mendukung pelaksanaan rehabilitasi anak terlantar ini. Sikap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi anak yaitu sabar dan tenang. Integritas dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Professional terlihat dari sikapnya untuk berkerjasama dengan pihak-pihak lainnya, berkonsultasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

9. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi pada kegiatan rehabilitasi anak terlantar di Dinas Sosial Kota Bandung sudah baik terlihat dari anak-anak yang menggunakan pakaian layak, makanan yang sehat, dan fasilitas bimbingan sosial yang memadai. Namun, masih sarana dan prasaran yang ada masih belum lengkap karena kondisi anggaran yang tidak dapat memenuhi fasilitas. Keadaan anak terlantar yang dibina di rumah singgah juga baik dan mereka sudah melakukan fungsi sosialnya dengan baik dapat dilihat dari cara mereka berinteraksi dengan peneliti menggunakan tutur bahasa yang sopan meskipun ada beberapa anak yang perlu pemantauan ekstra. Kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Dinas Sosial Kota Bandung juga mendapat dukungan dari lingkungan masyarakat ditandai dengan adanya kerjasama dengan Karang Taruna dan adanya salah satu Kepala Kecamatan di Kota Bandung yang menjadi anggota tim Unit Sosial Respon (USR) mengikuti kegiatan penjangkaran dan kegiatan rehabilitasi anak terlantar.





Implementasi rehabilitasi sosial anak terlantar di Dinas Sosial Kota Bandung, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat hambatan yaitu:

1. Kegiatan rehabilitasi hanya dilakukan selama 2 (dua) hari.

Sebagaimana pada standar rehabilitasi bahwa rehabilitasi dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari, namun Dinas Sosial Kota Bandung melaksanakan rehabilitasi hanya 2 (dua) hari. Hal ini dirasa tidak efektif karena adanya keterbatasan anggaran dan kemampuan penyuluh sosial dalam hal pemberian materi anak, karena pada dasarnya penyuluh sosial di rumah singgah tidak dikhususkan hanya pada anak, namun mengurus PPKS jenis lainnya yang berada di rumah singgah.

2. Fasilitas rehabilitasi anak terlandar kurang mendukung.

Kegiatan rehabilitasi anak terlantar dilakukan di ruangan anak namun pada ruangan tersebut tidak ada fasilitas yang mendukung proses rehabilitasi anak terlantar, hanya ruangan yang berisikan kursi, meja, kipas angin dan poster tahapan pelayanan.

3. Kegiatan anak terlantar bersatu dengan kegiatan PPKS lainnya.

Pada dasarnya anak terlantar memerlukan perhatian lebih, namun pada kegiatan bimbingan sosial anak digabungkan dengan PPKS jenis lainnya meskipun sudah dilakukan asesmen, sehingga materi yang diberikan tidak sesuai dengan usia anak sehingga anak tidak memperhatikan dan berlarian keluar karena materi yang disampaikan tidak menjadi perhatian bagi anak.

4. Sosialisasi yang diberikan tidak membuat keluarga klien jera.

Salah satu penyebab keberadaan anak terlantar salah satunya yaitu ketidaksiapan seseorang menjadi orang tua. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung hanya diberikan kepada keluarga klien saja dan tidak membuat keluarga klien jera, hal ini akibatnya ada beberapa anak yang terkena penjarangan sebanyak 2 (dua) kali. Dengan adanya hambatan tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung melakukan upaya yaitu dengan melakukan kerjasama selama 1 (satu) tahun dengan pihak yayasan dan memberikan izin kepada organisasi eksternal yang ingin memberikan materi kepada anak-anak terlantar yang dibina di Dinas Sosial Kota Bandung, namun hal tersebut belum mengatasi hambatan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil analisis penelitian berikut ini upaya yang dapat dilakukan yaitu: Bekerja sama dengan komunitas Kakak Asuh yaitu organisasi yang berfokus pada penanganan anak terlantar, hal ini agar para penyuluh sosial dapat berbagi informasi dan pengetahuan untuk menangani anak terlantar. Selain itu, bekerja sama dengan beberapa stakeholder seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dalam pengadaan buku bacaan untuk anak-anak terlantar di Rumah Singgah. Kegiatan bimbingan sosial anak terlantar terpisah dengan kegiatan bimbingan sosial PPKS lainnya, kegiatan anak juga dilaksanakan dengan metode yang dapat menarik perhatian anak seperti menggunakan gambar dan metode praktik keterampilan hal ini untuk meningkatkan kreatifitas anak.



**Tabel .1.** Konsep Kegiatan Rehabilitasi Anak Terlantar berdasarkan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Bandung tahun 2021-2024

No	Kegiatan	Output Kegiatan	Metode	Pelaksana
1.	Pemberian Materi			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materi Sesuai Asesmen</li> <li>Permainan Edukasi</li> <li>Pemberian Motivasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya semangat anak terlantar untuk merubah nasib.</li> <li>Berkurangnya trauma pada anak.</li> </ul>	Metode pengajaran <i>Participatory Active Learning (PLA)</i> metode 3R (Right, Responsibility, Rehabilitation).	Penyuluh Sosial, komunitas “Kakak Asuh”
	Usia 12-18 Tahun <ul style="list-style-type: none"> <li>Materi Reproduksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menambah pengetahuan anak yang sudah beranjak remaja.</li> </ul>	Melalui Powerpoint	Penyuluh Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perberdayaan Perempuan & Anak
2.	Literasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menambah pengetahuan anak.</li> </ul>	15 menit setiap hari digunakan untuk membaca.	Penyuluh Sosial, Dinas Perpustakaan & Kearsipan
3.	Praktik Keterampilan (Praktik Origami dan Menempel Kacang-Kacangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemampuan untuk berpikir kreatif.</li> </ul>	Mencontoh dan mengikuti.	Penyuluh Sosial
4.	Keterampilan Menanam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menambah pengetahuan mengenal tumbuhan.</li> </ul>	Mencontoh dan mengikuti	Penyuluh Sosial, Yayasan Kumala
5.	Kegiatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kerjasama pada anak</li> </ul>	Permainan gelas air	Penyuluh Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung, 2022

- Membuat fasilitas arena playground untuk anak usia dini yang edukatif di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandung, hal ini merupakan salah satu bentuk bimbingan fisik yang berguna untuk meningkatkan kemampuan fisik karena bergerak aktif dan membantu anak untuk bersosialisasi dengan anak terlantar lainnya.
- Membuat ruangan anak dengan konsep ramah anak dengan suasana yang menyenangkan dengan dilengkapi pojok baca untuk kegiatan literasi dan dinding yang dihiasi dengan gambar edukasi.
- Dinas Sosial Kota Bandung melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga dengan membuat infografis dan *policy brief* berisikan tentang anak terlantar.

## SIMPULAN

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Pada Anak Terlantar di Kota Bandung sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku oleh Pemerintah Kota Bandung dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tetapi masih memiliki beberapa kekurangan. Berdasarkan analisis implementasi menggunakan 6 unsur. yaitu (1). Ukuran dasar dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. (2). Komunikasi yang terjalin antara para pelaksana sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya koordinasi antara karang taruna wilayah Kota Bandung, tim unit sosial respon (USR),





kepolisian, TNI dan dinas terkait dilakukan baik secara verbal maupun rapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan. (3). Sumber-sumber kebijakan seperti sumber daya manusia (SDM) dan dana sudah tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan fasilitas yang menunjang kegiatan rehabilitasi sosial anak terlantar masih belum tersedia. (4). Aspek karakteristik badan pelaksana dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan dan sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana juga sudah sesuai dengan peran dan tugas yang dimiliki. (5). Aspek kecenderungan pelaksana dalam hal ini adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat yaitu adanya kepala kecamatan yang menjadi anggota tim USR. Meskipun berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hambatan mengenai kegiatan, fasilitas dan sosialisasi. (6). Pada aspek kondisi ekonomi sosial dan politik, berdasarkan hasil penelitian masih perlu peningkatan pada kebutuhan penunjang dalam mendukung terlaksananya kegiatan rehabilitasi anak terlantar di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial Kota Bandung melakukan upaya yaitu dengan melakukan kerjasama selama 1 (satu) tahun dengan pihak yayasan dan memberikan izin kepada organisasi eksternal yang ingin memberikan materi kepada anak-anak terlantar yang dibina di Dinas Sosial Kota Bandung, namun dengan adanya hambatan maka dilakukan upaya yang diberikan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan komunitas Kakak Asuh selain itu membentuk kegiatan rehabilitasi anak terlantar yang tidak monoton dan kegiatan yang memperhatikan perkembangan anak terlantar. Selain itu, membuat fasilitas edukatif bagi anak seperti playground edukatif, ruangan anak yang nyaman dan pojok baca serta melakukan sosialisasi kepada keluarga klien dengan menggunakan infografis yang berisikan ancaman bagi seseorang yang melakukan penelantaran anak dan policy brief.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhamad Nur. (2014). Implementasi Kebijakan Pembangunan di Kawasan Bandung Utara dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Administrasi* 11(2). <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/39>
- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: shifting collaboration in stunting interventions at the local level. *Development Studies Research*, 10 (1), 2212868. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Agustina, Nina dan Dody Setyawan. (2019). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1). <http://repository.unitri.ac.id/788/1/3-5.%20IMPLEMENTASI%20PROGRAM%20PEMBINAAN%20ANAK%20TERLANTAR.pdf>
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta
- Aman, Fadlun dkk. (2017). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSA) di Dinas Sosial Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 5(12). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9800/7787>
- Ariska, Lilis. (2021). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Skripsi*. [https://repository.unsri.ac.id/55846/5/RAMA\\_63201\\_07011181722010\\_0018087801\\_0009037604\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/55846/5/RAMA_63201_07011181722010_0018087801_0009037604_01_front_ref.pdf).
- Fitri, Fensi Akra. (2020). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 2(4). <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/269/>.

- Harun, Nur Istyan dan Khairul T. Haras. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal Of Public Administration Studies*, 2(1). <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjpads/article/view/554>
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2005). *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta : UI Press.
- Mutiara, Puput. (2020). Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen. Tersedia di: <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Sosial%20yang,di%20Indonesia%20sebanyak%2067.368%20orang.> [Diunduh pada 5 Maret 2022]
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2021-2024
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.